



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Yth : Ketua Pengadilan Agama
Sewilayah Lampung

SURAT EDARAN

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN DAN PENERAPAN
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan kualitas layanan di lingkungan Peradilan Agama se-Wilayah Lampung, mendukung implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta mendukung implementasi Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP), dengan ini disampaikan kepada seluruh Ketua Pengadilan Agama se-Provinsi Lampung untuk :

a. Melakukan Penguatan Pengawasan Internal

1. Mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh atasan langsung dan Hakim Pengawas Bidang.
2. Melaksanakan pengawasan melekat secara berkala terhadap seluruh aparatur, baik teknis maupun non-teknis.
3. Menindaklanjuti setiap laporan/pengaduan masyarakat dengan cepat dan profesional.
4. Meningkatkan kesadaran aparatur terhadap kode etik dan perilaku sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP)

1. Mendorong implementasi ISO 37001:2016 tentang SMAP sebagai bagian dari budaya kerja yang bersih dan transparan.
2. Menunjuk dan mengaktifkan Fungsi Kepatuhan Anti Penyipuan (FKAP) pada satuan kerja masing-masing.
3. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait kebijakan anti penyipuan kepada seluruh aparatur dan pihak eksternal yang berinteraksi dengan pengadilan.

4. Menyusun dan menginternalisasi dokumen kebijakan, prosedur, serta pelaporan dugaan penyuaian sesuai dengan pedoman SMAP.

Diharapkan Saudara melaksanakan surat edaran ini dengan langkah nyata dan melaporkan perkembangan pelaksanaannya secara berkala kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandarlampung
Pada tanggal 7 Mei 2025

KETUA,


Dr. INSYAFLI, M.H.I.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.